

IMPLEMENTASI KURIKULUM SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Adawiyah Pettalongi
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

INFO ARTIKEL

Diterima :
15 November 2022
Disetujui :
17 Januari 2023
Dipublikasikan :
15 Februari 2023

Abstrak:

Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: transformasi diri, transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, transformasi masyarakat. Pendidikan multikultural juga dinilai penting guna menjembatani perbedaan kepentingan dan perbedaan karakter dalam pendidikan-pendidikan lokal. Perbedaan kepentingan merupakan salah satu kendala pembangunan pendidikan nasional selama lebih dari setengah abad. Dengan pengembangan model pendidikan berbasis multikultural diharapkan mampu menjadi salah satu metode efektif untuk meredam konflik

Abstract:

The educational model in Indonesia as well as in other countries shows the diversity of goals that implement strategies and the means used to achieve them. Multicultural education in Indonesia needs to use a combination of existing models, so that as proposed by Gorski, multicultural education can include three types of transformation, namely: self-transformation, school transformation and teaching and learning processes, and community transformation. Multicultural education is also considered important to bridge differences in interests and differences in character in local education. Differences in interests have been one of the obstacles to the development of national education for more than half a century. With the development of a multicultural-based educational model, it is expected to be an effective method for reducing conflict

Kata Kunci:

Implementasi
Kurikulum dan
Pendidikan
Multikultural

Alamat Korespondensi

Nama : Adawiyah Pettalongi
Instansi : Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Surel : adawiyah@iainpalu.ac.id

Bangsa Indonesia menganut prinsip filosofis pluralistik yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini memiliki arti dan nilai yang dalam dan luas bagi perkembangan keharmonisan dan keutuhan hidup. Bhinneka Tunggal Ika adalah ungkapan yang mewakili keragaman budaya, bahasa, suku dan agama. Para founding fathers kita berusaha merumuskan konsep Bhineka Tunggal Ika agar perjalanan bangsa ini ke depan dapat menuai keharmonisan atas perbedaan yang ada di dalam bangsa ini. Prinsip kebhinekaan didasarkan pada gagasan tentang keragaman bahasa, tradisi dan budaya, serta agama dari Sabang sampai Merauke. Budaya ini juga mempengaruhi sikap bangsa

yang telah lama toleran dan sadar akan keberagaman. Alhasil, orang Indonesia diterima secara luas di banyak negara dan kalangan dunia.

Ada tiga alasan mengapa pendidikan dengan filosofi keberagaman dalam bangsa majemuk penting untuk diperhatikan di negara seperti ini, yang akhir-akhir ini banyak disebut oleh para ahli pendidikan sebagai multikultural. Upaya untuk membangun pemahaman ke-bhineka-an dalam ke-ika-an dibutuhkan percermatan yang utuh. Pertama, sendi *equality*. Secara kebahasaan *equality* berasal dari kata *equal* yang berarti sama. Term *equality* juga dapat difahami sebagai persamaan. Adapun yang dimaksud *equality* dalam pendidikan adalah kesejajaran atau perlakuan merata yang diterima setiap peserta didik dalam memperoleh pendidikan, tanpa memandang status ekonomi dan strata sosial.

Dalam UUD 1945 pasal 31 diungkapkan bahwa ‘tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal ini merupakan implementasi dari penghargaan para perancang negeri ini dalam pembangunan bidang pendidikan yang selaras dengan kondisi masyarakat yang plural, baik secara stratifikasi sosial, agama, dan suku. Kedua, sendi pluralitas. Kondisi masyarakat nusantara yang terdiri dari keragaman (pluralitas) agama, suku dan budaya mendorong perlunya ditanamkan pemahaman yang inklusif dalam memahami perbedaan. Dengan ditanamkannya pemahaman pluralisme diharapkan setiap anak bangsa faham bahwa perbedaan ada bukan untuk saling menghantam antara satu agama dengan agama lainnya, bukan sebagai ajang penjajahan suku mayoritas terhadap minoritas, dan bukan pula untuk merendahkan suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Dengan adanya perbedaan itu harus difahami sebagai sarana saling menghargai dan saling melengkapi (*mutual respect*). Pluralistas adalah nafas dari ke-bhineka-an. Olehnya perlu kiranya setiap kurikulum yang ada disetiap sekolah atau madrasah dirancang berbasis multikultural.

METHOD

Kajian artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui telaah pustaka seperti jurnal, artikel, yang terkait sesuai dengan permasalahan yang hendak dikaji peneliti. Teknik analisis menggunakan pada penelitian ini yang pertama adalah mengelompokan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema kemudian dianalisis berdasarkan isi dan diinterpretasikan selanjutnya akan mengambil kesimpulan.

HASIL

Pengembangan Kurikulum

Pengertian

Pengembangan berasal dari kata “kembang” yang artinya menjadi maju, sempurna, berkembang. Jadi, pengembangan adalah proses, cara perbuatan mengembangkan suatu hal agar dapat bertambah maju menuju ke arah yang lebih sempurna (Salim, 1991: 700). Pengembangan ini juga dapat diartikan sebagai perubahan dari masa ke masa, artinya merubah suatu struktur yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengembangan kurikulum (*curriculum development*) adalah *the planning of learning opportunities intended to bring about certain desired in pupils. And assesment of the extent to which these changes have taken piece* (Oemar, 2006: 96).

Rumusan ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa

ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan yang dimaksud kesempatan belajar (*learning opportunity*) adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan peralatan, dan lingkungan dimana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Ini terjadi bahwa semua kesempatan belajar direncanakan oleh guru, bagi para siswa sesungguhnya adalah kurikulum itu sendiri.

Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum

Adapun dasar-dasar Pengembangan kurikulum yaitu

- a. Kurikulum disusun untuk mewujudkan system pendidikan nasional
- b. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan pendekatan kemampuan
- c. Kurikulum harus sesuai dengan cirri khas satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.
- d. Kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi dikembangkan atas dasar standar nasional pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- e. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan kebutuhan potensi, dan minat peserta didik dan tuntutan pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan.
- f. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan mencakup aspek spiritual keagamaan, intelektualitas, watak konsep diri, ketrampilan belajar, kewirausahaan, keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, pola hidup sehat, estetik dan rasa kebangsaan (Maslikhah, 2007: 43).

Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan sebagai satu disiplin ilmu perlu bahkan seharusnya mendapat perhatian secara khusus dan menempati kedudukan dan fungsi sentral dalam system pendidikan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara multidimensional sebagai berikut :

- a. Kebijakan nasional dalam rangka pembangunan nasional sebagai upaya merealisasi butir-butir ketetapan dalam GBHN khususnya yang berkenaan dengan system pendidikan Nasional.
- b. Kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan dalam rangka merealisasikan UU No. 2 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa kurikulum menempati kedudukan sentral.
- c. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sinkron dengan kebutuhan pembangunan dan memenuhi keperluan system pendidikan dalam upaya memanfaatkan, mengembangkan dan menciptakan IPTEK.
- d. Kebutuhan, tuntutan, aspirasi dan masalah dalam system masyarakat yang bersifat dinamis dan berubah dengan cepat dewasa ini dan masa datang.
- e. Profesionalisasi dan fungsionalisasi ketenagaan bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berkualitas dan mampu bekerja sama dengan unsur-unsur ketenagaan profesi lainnya.
- f. Upaya pembinaan disiplin ilmu pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berkaitan dengan upaya pembinaan disiplin ilmu lainnya, serta pembinaan ilmu pendidikan khususnya (Sulthon, 2014: 43-72).

Prinsip pengembangan kurikulum

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai

dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi, serta masyarakat yang sedang membangun. Pembangunan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah sehingga dapat memperlancar pelaksanaan proses pendidikan dalam rangka perwujudan atau pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Selama terjadinya perkembangan dan pengembangan kurikulum sekolah Indonesia, masing-masing mengikuti prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berbeda. Namun sasaran yang hendak dicapai adalah sama yaitu dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan Nasional pada khususnya dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang didasarkan pada kerangka dasar pembangunan Nasional yang tertuang dalam GBHN.

a. Prinsip Relevansi

Pendidikan dapat dipandang sebagai *invested of men power resources*. Oleh karena itu, lulusan dari pendidikan harus memiliki nilai relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk dapat menghasilkan lulusan pendidikan yang memiliki relevansi tersebut diperlukan kurikulum yang dapat mengantisipasi apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Apabila kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka lulusan atau hasil pendidikan tersebut memiliki nilai relevansi yang memadai (Machalli dan Musthofa, 2004: 278-279).

b. Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

1) Prinsip Efektivitas

Efektifitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau dapat diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Bila ada 10 jenis kegiatan yang kita rencanakan, dan tercapainya untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka efektifitas kegiatan masih belum memadai. Demikian pula bila ada 10 tujuan yang kita inginkan dan ternyata 5 yang tercapai, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut masih dipandang kurang efektif ini dapat kita tinjau dari 2 segi efektifitas mengajar guru, dan efektifitas belajar murid (Machalli dan Musthofa, 2004: 278-279).

2) Prinsip Efisiensi

Untuk menyelesaikan suatu program kita memerlukan waktu, tenaga dan biaya-biaya yang kadang-kadang sangat besar jumlahnya. Kesemuanya itu tergantung pada banyaknya program yang akan diselesaikan. Jadi efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan pengeluaran (berupa waktu, tenaga dan biaya) yang diharapkan paling tidak menunjukkan hasil yang seimbang.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kurikulum atau proses belajar mengajar. Maka proses belajar mengajar dikatakan efisien jika usaha dan biaya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut dapat merealisasikan hasil yang optimal (Machalli dan Musthofa, 2004: 278-279).

Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal. Pertama kurang waktu. Kedua kurang sesuaian pendapat, baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Ketiga karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri (Sukmadinata, 2009: 160). Hambatan lain datang dari masyarakat untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap system pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan.

Masyarakat adalah sumber input dari sekolah. Keberhasilan pendidikan, ketepatan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan, serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat. Hambatan lain yang dihadapi oleh pengembang kurikulum, apalagi yang berbentuk Kegiatan eksperimen baik metode isi atau system secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit.

Konsep kurikulum Pendidikan Multikultur

Dan kehidupan yang bhineka tidak dapat tercermin tanpa adanya pemahaman keberagaman. Dan dalam konteks Indonesia yang selama ini tersulut api eskalasi pertentangan etnis dan agama, tepat jika kita mulai menggelorakan semangat pendidikan multikultural. Karena lembaga pendidikan (informal, formal dan nonformal) dinilai sangat efektif dalam melakukan transformasi nilai. Dalam praksis pendidikan, kurikulum hendaknya diarahkan untuk membina pemahaman yang inklusif terhadap perbedaan. Sehingga dari pemahaman siswa pada keragaman dalam lingkungan masyarakat dapat mendorong keselarasan dan tumbuh relasi sosial yang dinamis. Ketiga, menegakkan toleransi. Sebuah aktualisasi dari pluralitas yang dalam istilah lokalnya dikenal dengan tepa selira. Apabila pemahaman tentang keberagaman (pluralitas) telah terpatir pada setiap individu, maka bersemailah sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat akan hidup harmonis dalam kebhineka-an dan membangun bangsa dengan kebhinekaan (Sukmadinata, 2009: 160).

Pemerintah telah memberikan prioritas yang tinggi pada perkembangan sektor pendidikan didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan merupakan pilar utama membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Untuk mengurangi ketimpangan antara kualitas out put pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan ketimpangan kualitas pendidikan antara desa dan kota, serta antara penduduk kaya dan miskin. Disamping itu, muncul dua problem yang terkait dengan persoalan di atas, yaitu pendidikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial, dan pendidikan sistem persekolahan hanya mentransfer kepada peserta didik dengan apa yang disebut "*the dead knowledge*". Sebuah pengetahuan yang terlalu bersifat *text-bookish* sehingga bagaikan telah tercabut dari akar sumbernya maupun aplikasinya (Maliki, 2010: 25).

Untuk itulah upaya pembaharuan pendidikan, khususnya kurikulum dan tenaga pengajarnya harus ditingkatkan kualitasnya agar proses pencerdesan generasi anak bangsa ini ke depan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya masing-masing tanpa mengalami gangguan diskriminatif sedikitpun. Konsep Multikultural Secara sederhana, multikultural berarti "keberagaman budaya". Sebenarnya, ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut –baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda- yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'.

Konsep pluralitas mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu'; keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep terdahulu, multikultural sebenarnya relatif baru. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme

memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikultural menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman (Nasution: 1999: 2).

Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya. Diversitas dalam masyarakat modern bisa berupa banyak hal, termasuk perbedaan yang secara alamiah diterima oleh individu maupun kelompok dan yang dikonstruksikan secara bersama dan menjadi semacam common sense. Perbedaan tersebut menurut Bikhu Parekh bisa dikategorikan dalam tiga hal-salah satu atau lebih dari tiga hal-, yaitu pertama perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. Kedua, perbedaan dalam perpektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perpektif kritis terhadap mainstream nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. Ketiga, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang genuine sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*) (Nasution: 1999: 2).

Sebagai sebuah gerakan, menurut Bhikhu Parekh, baru sekitar 1970-an multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Setelah itu, diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Setelah tiga dekade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting yaitu, pertama multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (*needs of recognition*) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini. Gelombang kedua, adalah multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya, yang mengalami beberapa tahapan, diantaranya: kebutuhan atas pengakuan, melibatkan berbagai disiplin akademik lain, pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme, gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli/masyarakat adat (*indigeneous people*), post-kolonialisme, globalisasi, post-nasionalisme, post-modernisme dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur kemapanan dalam masyarakat (Hanum, 2005: 69.). Kurikulum Multikultural Secara generik, kurikulum multikultur memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep kurikulum multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. alam implementasinya, paradigma kurikulum multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini: Kurikulum multikultural harus menawarkan kontens (isi materi) yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang. Kurikulum multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Kurikulum

multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama (Nasution, 1999: 25). Kurikulum yang multi-kultur mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan kurikulum multikultur dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis. Untuk membuat kurikulum pada jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah yang siswanya beragam suku bangsa, maka dibutuhkan kesadaran akan kebinekaan yang dimiliki para siswa tersebut. Langkah yang dilakukan sebagai berikut: Memilih kriteria bahan yang signifikan, relevan (cocok) dengan keberadaan mereka yang berbeda suku bangsa itu. Mendorong agar tujuan dari kurikulum diarahkan untuk saling menguatkan “keberbedaan” mereka dengan cara mengenalkan corak khas masing-masing suku tersebut kepada semua siswa, misalnya tentang jenis bahasa, adat, budayanya, seni dan seterusnya. Secara teknis, kurikulum tersebut di atas dapat diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran yang dapat dimasuki nilai-nilai pengenalan multikultur tersebut. Untuk mendukung hal di atas, Hilda Taba dalam Mahfud memberikan kriteria berikut agar kurikulum yang diajarkan di sekolah tepat sasaran. Kurikulum menyajikan bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat murid (Mahfud, 2009: 9)

Kebutuhan ini dapat ditafsirkan bahwa perbedaan suku tersebut menjadi bahan yang perlu dipikirkan. Sedangkan minat murid, artinya memberikan kesenangan bahwa apa yang dipelajari berhubungan dengan kondisi yang ada disekitar dirinya. Kurikulum dikemas dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara keluasan dan kedalaman bahan. Dalam pembuatan kurikulum, meski dipusatkan pada bidang-bidang tertentu tetap harus membuka kemungkinan untuk memahami bidang-bidang yang lain. Kurikulum mempertimbangkan relevansi dengan kenyataan sosial dan kultural agar anak didik lebih mampu memahami dunia tempat ia hidup, serta perubahan-perubahan yang terus menerus terjadi.

Pokok pikiran Hilda tersebut sangat menghargai bagaimana multikultur dapat dikembangkan melalui pembelajaran di sekolah. Kurikulum harus didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas guna meningkatkan pemahaman tentang kemajemukan suku, ras, budaya dan agama nusantara. Dalam praktik pembelajarannya, di sekolah laboratorium dikemas dengan cara menyajikan bentuk kurikulum integratif yang sesuai dengan kemajemukan siswa yang ada. Siswa diajak saling mengenal ragam budaya, bahasa, adat-istiadat, ras, serta bila perlu agamanya sekalian. Dengan cara demikian, selain isi tujuan materi tersampaikan juga terjalin sikap saling toleransi yang tinggi antar siswa. Mereka perlu dipupuk dengan cara saling mengenalkan multi-kultur yang ada. Dengan cara itu diharapkan muncul “kesadaran moral” untuk memahami keberadaan mereka masing-masing. Guru Sekolah Laboratorium bersifat Multikultur Untuk mendukung pengelolaan sekolah laboratorium multikultur, peran sentral guru sangat dibutuhkan. Guru menjadi kunci utama dalam proses mendidik, membimbing dan melatih para siswa yang beragam tersebut. Karena itu, menurut hemat penulis, guru yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Guru yang memiliki wawasan kebangsaan

yang luas serta punya ketrampilan pedagogik/mengajar yang sesuai dengan kebutuhan sekolah laboratorium terpadu (Mahfud, 2009: 9).

Guru yang memiliki sikap terbuka dan tidak diskriminatif terhadap salah satu suku atau komunitas yang ada. Hal ini penting karena untuk menjadi "percontohan" seorang guru harus netral yang bisa mengayomi di atas kemajemukan siswa tersebut. Guru yang memiliki jiwa inovasi (pembaharu). Jiwa inovasi diperlukan, karena upaya sekolah Laboratorium difungsikan untuk menjadi miniatur kehidupan masyarakat siswa yang sesungguhnya. Guru mengerti akan perubahan-perubahan sosial ekonomi serta politik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang guru yang tidak pernah kehabisan ide/gagasan dan tidak pernah puas tentang kondisi yang ada. Guru yang memiliki jiwa kreatif. Yaitu guru yang suka membuat terobosan baru yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah laboratorium terpadu sebagai ladang atau tempat "penelitian" bagi akademisi yang akan disumbangkan kepada masyarakat luas (Mahfud, 2009: 12). Dengan cara yang kreatif, maka dapat dihasilkan model-model baru produk Laboratorium seperti model kurikulum, model pembelajaran, pola manajemen, serta penciptaan lingkungan sekolah. Guru yang mampu melakukan penelitian. Untuk kepentingan guru, sekolah, dan masyarakat luas, penelitian seyogyanya menjadi "ciri khas" sekolah laboratorium terpadu guna mengembangkan model-model pembelajaran multikultur. Misalnya guru meneliti dari aspek bahasa, adat istiadat, budaya, serta perilaku mereka yang tampak sehari-hari dalam berinteraksi disekolah. Penutup Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum multikultur adalah keniscayaan yang harus dikembangkan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang menganut falsafat bhineka tunggal ika.

Dengan munculnya konsep kurikulum multikultur diharapkan membuka cara pandang baru terhadap model pembelajaran yang relevan dengan kenyataan sosial yang ada. Kurikulum multikultural didesain dengan cara menawarkan kontens (isi materi) yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang, didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap serta dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Kurikulum multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama Peran sentral guru dalam sekolah laboratorium yang bersifat multikultur dapat dilihat dari beberapa kreteria, yaitu guru yang mempunyai wawasan kebangsaan yang luas, memiliki jiwa terbuka dan tidak diskriminatif, memiliki jiwa visioner, kreatif dan mampu melaksanakan penelitian.

Pengembangan pendidikan multikultural

Nur Achmad menjelaskan bahwa dalam pengembangannya, kurikulum dengan menggunakan pendekatan mutikultural haruslah didasarkan pada prinsip:

- a. keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubunga sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat,
- b. keragaman budaya menjadi dasar dalam pengembangan berbagai komponene kurikulum seperti juaan, konten, proses, dan evaluasi,
- c. budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belaar anak didik, kurikulum beperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional (Achmad, 2001: 88).

Ada beberapa tahapan yang diperhatikan dalam pengembangan kurikulum berbasis pendidikan multikultural yakni:

- a. Merumuskan visi, misi, tujuan sekolah, dan pengembangan diri yang mencerminkan kurikulum sekolah yang berbasis multikultur.
- b. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Yang Bermuatan Multikultur, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1). Urgensi dengan kehidupan peserta didik yang berhubungan dengan multikultur
 - 2). Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran lain yang memuat multikultur
 - 3). Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dalam masyarakat yang multikultur
 - 4). Keterpakaian atau kebermaknaan bagi peserta didik dalam aktivitas kehidupan sehari-hari (Matsuroh, 2010: 72-83).
- c. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran Yang Bermuatan Multikultur, dengan mempertimbangkan:
 - 1) keberagaman peserta didik
 - 2) karakteristik mata pelajaran
 - 3) relevansi dengan karakteristik daerah
 - 4) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik
 - 5) kebermanfaatan bagi peserta didik
 - 6) aktualitas materi pembelajaran dan
 - 7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan.
- d. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran Yang Bermuatan Multikultur.

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri dan berpusat pada peserta didik dan dengan menerapkan beberapa metode yang relevan seperti metode diskusi, tanya jawab, bermain peran, penugasan, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memuat multikultur adalah sebagai berikut:

 - a. Kegiatan pembelajaran multikultur disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik (guru), agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
 - b. Kegiatan pembelajaran multikultur memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik.
 - c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan materi pembelajaran muatan multikultur.
 - d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran yang bermuatan multikultur minimal mengandung dua unsur yaitu kegiatan peserta didik dan materi multikultur (Zamroni, 2011: 128).
- e. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi Yang Bermuatan Multikultur.

Indikator yang bermuatan multikultur merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bermuatan multikultur. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, lingkungan dan potensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja

operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian (Zamroni, 2011: 131).

f. **Penentuan Jenis Penilaian Yang Bermuatan Multikultur**

Penilaian pencapaian kompetensi dasar yang bermuatan multikultur bagi peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang bermuatan multikultur. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian yang bermuatan multikultur merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Mahfud, 2009: 38).

g. **Menentukan Sumber Belajar Yang Bermuatan Multikultur**

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang bermuatan multikultur digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar yang bermuatan multikultur didasarkan padastandar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi (Supriadi, 2015, 1-14).

Pentingnya Model-Model Pendidikan Multikultural

Sebagai bangsa heterogen atau majemuk, multikulturalisme menjadi sangat penting dikembangkan maka program-program multikultural senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh simpati terhadap perjuangan multikultural tersebut. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut :

- a. Multikulturalisme perlu menjadi bagian kurikulum pendidikan. Dimensi multikultural harus tercermin di dalam pelajaran kewarganegaraan, geografi, sastra, sejarah, politik dan ekonomi. Pendidikan agama dan moral perlu memperkenalkan realita pluralitas, tanpa mereduksi ke dalam relativisme. Akan lebih baik bila pemeluk agama yang bersangkutan yang memberi penjelasan.
- b. Di dalam ruang publik, dimensi multikultural perlu mendapat dorongan, selain dalam bentuk politik, juga dalam ekspresi seni, teater, musik dan film.
- c. Perlu dikembangkan program yang memungkinkan dijaminnya representasi minoritas di dalam politik, pendidikan dan lapangan kerja.
- d. Pemerintah perlu mendorong pengelola media massa seperti radio, televisi, koran, majalah dan internet agar memperhatikan dan mempunyai kepedulian multikultural (Mahfud, 2009: 39).

Bentuk-bentuk kreativitas lain diperlukan untuk mengintensifkan perjumpaan dan dialog. Kebijakan multikultural biasanya mengusik kemapanan kelompok mayoritas yang sudah menikmati privilese sebagai kelompok dominant. Penyebabnya ialah bahwa multikulturalisme mempunyai implikasi terhadap masalah representasi politik, budaya, lapangan kerja dan pendidikan. Maka reaksi pertama biasanya akan mendiskualifikasinya sebagai gagasan yang mau mempertahankan hegemoni dan kepentingan-kepentingan serta para pendukung mereka. Pemahaman bahwa kelompok-kelompok budaya dan minoritas yang kuat akan mampu memberdayakan civil society tidak masuk dalam perspektif para penentang multikulturalisme.

Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada, terbatas pada keragaman budaya yang ada, jadi terbatas pada dimensi kognitif.

Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Terlepas dari kritik atas penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti di Amerika Serikat merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Penulisan kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam merupakan suatu agenda pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis dan praktisi pendidikan. Di Jepang aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang menyangkut peran Jepang pada perang dunia II di Asia. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagian masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang, agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali. Sedangkan di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latarbelakang dalam pembentukan Indonesia.

Model lainnya adalah pendidikan multikultural tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. *Affirmative action* dalam seleksi siswa sampai rekrutmen pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. Contoh yang lain adalah model "sekolah pembauran" Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok. Di Amerika Serikat bersamaan dengan masuknya wacana multikulturalisme, dilakukan berbagai lokakarya di sekolah-sekolah maupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial, toleransi dan mengurangi prasangka antar kelompok (Junaidi, 2018, 57-72).

Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: transformasi diri, transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, transformasi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: transformasi diri, transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, transformasi masyarakat.

Pendidikan multikultural juga dinilai penting guna menjembatani perbedaan kepentingan dan perbedaan karakter dalam pendidikan-pendidikan lokal. Perbedaan kepentingan merupakan salah satu kendala pembangunan pendidikan nasional selama lebih dari setengah abad. Dengan pengembangan model pendidikan berbasis multikultural diharapkan mampu menjadi salah satu metode efektif untuk meredam

konflik. Selain itu, pendidikan multikultural bisa menanamkan sekaligus mengubah pemikiran peserta didik untuk benar-benar tulus mengharagai keberagaman etnis, agama, ras, dan golongan. Pendidikan multikulturalisme menjadi sangat penting dikembangkan maka program-program multikultural senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh simpati terhadap perjuangan multikultural tersebut.

Saran

Kepada Pemerintah dapat menyadari realita keadaan masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah dapat merancang kurikulum berbasis multikulturalisme. Dan kepada semua guru, dosen, tenaga pengajar, dan praktisi pendidikan lainnya didorong untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dalam setiap proses belajar mengajar (PBM) dengan memberikan pemahaman tentang realitas multikulturalisme sesuai dengan kondisi yang ada dalam kehidupan sosial peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur. *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: PT. Gramedia, 2001.
- Hamolo, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hanum, Farida. *Fenomena Pendidikan Multikural*. Yogyakarta: Lemlit UNY, 2005.
- Junaidi, *Model Pendidikan Multikultural*, Al-Insyiroh Volume 2, Nomor 2, 2018.
- Machalli, Imam dan Musthofa. *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Maliki, Zainuddin. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.
- Maslikhah. *Pendidikan Mulikultural*. Semarang: PT.Temprina Media Grafika, 2007.
- Matsuroh, *Kurikulum Pendidikan Berbasis Multikultural*, Millah Edisi Khusus Desember, 2010.
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Salim, Peter dan Salim, Yeni. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Rema Rosdakarya, 2009.
- Sulthon, *Dinamika Pengembangan KuriKulum Ditinjau Dari Dimensi Politisasi PenDiDikan dan eKonomi*, [https:// journal. iainkudus. ac.id/index. php/Edukasia/ article/download/763/732](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/download/763/732), Vol. 9, No. 1, Februari 2014.
- Supriadi, *Pendidikan Islam Multikultural (Tantangan dan Relevansinya di Indonesia)*, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 13 No.23 April 2015.
- Zamroni. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin KalamUtama, 2011.